



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. A. Yani Km. 40 Gedung Berintan Lt. III Telp/Fax (0511) 4721113
Martapura Kodepos 70611 Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANJAR

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA BADAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56); dan
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis

KEDUA Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja; menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja; menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025-2030.

- KETIGA Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Indikator Kinerja Utama bagi Pejabat Struktural Eselon III dan IV, Fungsional dan Pelaksana tercantum dalam lampiran II dan III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura

Pada tanggal : 22 September 2025

KEPALA BADAN,



dr. H. Tofik Norman Hidayat

Pembina Utama Muda

NIP. 19730319 200501 1 010

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 35 Tahun 2025

TANGGAL : 22 September 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAKESBANGPOL KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di suatu daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi, dinamika, dan tingkat perkembangan demokrasi di Kabupaten Banjar melalui pengukuran berbasis indikator yang terstandar secara nasional.	<p>a) Klasifikasi dan Kodefikasi Data: Tahap awal analisis dilakukan dengan menata seluruh temuan dari berbagai sumber ke dalam 22 indikator IDI. Setiap peristiwa, kebijakan, atau aktivitas sosial-politik yang ditemukan melalui dokumen resmi, pemberitaan media, atau hasil FGD dikategorikan ke dalam indikator yang sesuai berdasarkan tabel operasionalisasi IDI Banjar 2025.</p> <p>b) Pemberian Skor Aktual: Data diklasifikasi, setiap indikator diberi skor aktual (X_i) berdasarkan hasil kompilasi bukti lapangan, dokumen resmi, dan konfirmasi dari peserta FGD. Skor ini mencerminkan nilai kuantitatif dari kondisi demokrasi Kabupaten Banjar pada tahun 2025.</p> <p>c) Normalisasi Nilai Indikator: (rumus 1)</p> <p style="text-align: center;">❖ Normalisasi Nilai Indikator</p> <p>atau, jika arah hubungan indikator negatif, maka</p> $I_i = 100 \times \frac{(X_{max} - X_i)}{(X_{max} - X_{min})}$ <p>Keterangan: I_i = Nilai indeks indikator ke-i, X_i = Nilai aktual indikator, X_{max} = Nilai ideal (terbaik), X_{min} = Nilai terburuk.</p> <p>d) Pembobotan Indikator dan Aspek: (rumus 2)</p>	Kepala Badan	Hasil Survey IDI di Kabupaten Banjar

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				<p style="text-align: center;">❖ Pembobotan Indikator dan Aspek</p> <p>Pembobotan dengan hasil <i>Analytic Hierarchy Process (AHP)</i> yang ditetapkan BPS (2021). Bobot mencerminkan kontribusi relatif tiap indikator terhadap aspek demokrasi yang diwakilinya</p> $I_{\text{aspek}} = \sum_{i=1}^n (w_i \times I_i)$ <p>Pembobotan dengan hasil <i>Analytic Hierarchy Process (AHP)</i> yang ditetapkan BPS (2021). Bobot mencerminkan kontribusi relatif tiap indikator terhadap aspek demokrasi yang diwakilinya.</p> <p>e) Bobot Aspek IDI Komposit: (1) Aspek Kesetaraan, Bobot 0,376, Peringkat 1; (2) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, Bobot 0,314, Peringkat 2; (3) Aspek Kebebasan, Bobot 0,310, Peringkat 3.</p> <p>f) Nilai Hasil Akhir: Kategori Tinggi (interval nilai >80), Kategori Sedang (interval nilai 60 - 80), Kategori Rendah (interval nilai <40)</p>		
2.	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat efektivitas, partisipasi, dan ketahanan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung stabilitas sosial politik di daerah. IKO disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu dimensi kerawanan, dimensi partisipasi, dan dimensi kelembagaan, yang secara bersama-sama mencerminkan kinerja dan peran ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	$IKO = \frac{\sum 3 \text{ Indeks dimensi}}{3}$ <p>Keterangan:</p> <p>a) IKO : Indeks Ketahanan Ormas</p> <p>b) Dimensi Kelembagaan : Menggambarkan kekuatan organisasi dari sisi legalitas, kepengurusan, dan program kerja.</p> <p>c) Dimensi Partisipasi : Menunjukkan tingkat keterlibatan ormas dalam kegiatan sosial, politik, dan kemasyarakatan.</p> <p>d) Dimensi Kerawanan : Menunjukkan tingkat potensi konflik, radikalisme, atau penyalahgunaan ormas (semakin rendah kerawanan, semakin tinggi nilainya).</p>		Hasil Survey IKO di Kabupaten Banjar

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai Sakip PD adalah hasil pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta pencapaian sasaran kinerja suatu perangkat daerah berdasarkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja intern</p> <p>Nilai S akip PD merupakan indikator akuntabilitas dan kualitas manajemen kinerja yang menggambarkan sejauhmana PD mampu mengelola sumber daya publik untuk mencapai tujuan pemerintah daerah secara efektif dan efisien.</p> <p>Kategori penilaian :</p> <p>AA : > 90 – 100 (Sangat Memuaskan)</p> <p>A : > 80 – 90 (Memuaskan)</p> <p>BB : > 70 – 80 (Sangat Baik)</p> <p>B : > 60 – 70 (Baik)</p> <p>CC : > 50 - 60 (Cukup Memadai)</p> <p>C : > 30 – 50 (Kurang)</p> <p>D : > 0 – 30 (Sangat Kurang)</p>	<p>Nilai SAKIP PD = (P x 0,30) + (M x 0,30) + (L x 0,15) + (E x 0,25)</p> <p>Keterangan :</p> <p>P (Perencanaan Kinerja = Bobot 30%)</p> <p>M (Pengukuran Kinerja = Bobot 30%)</p> <p>L (Pelaporan Kinerja = Bobot 15%)</p> <p>E (Evaluasi akuntabilitas kienrja intern = Bobot 25%)</p>		LHE Perangkat Daerah



KEPALA BADAN,

dr. H. Tofik Norman Hidayat

Pembina Utama Muda

NIP. 19730319 200501 1 010

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAKESBANGPOL
 KABUPATEN BANJAR
 NOMOR : 35 Tahun 2025
 TANGGAL : 22 September 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEJABAT ESELON III DAN IV BAKESBANGPOL KABUPATEN BANJAR
 TAHUN 2025**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IKKI adalah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Internal pada Perangkat Daerah. Kepatuhan adalah sebuah spesifikasi, standar atau hukum yang harus diikuti dalam tata kelola organisasi Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau tidak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja Utama adalah Kinerja prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	$\Sigma(\text{Perencanaan Kinerja } 30\% + \text{Pengukuran Kinerja } 30\% + \text{Pelaporan Kinerja } 15\% + \text{Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal } 25\%)$	Sekretaris	Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah persentase jumlah elemen masyarakat yang telah memperoleh pembinaan, sosialisasi, atau kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa dibandingkan dengan jumlah target peserta pembinaan pada tahun berjalan.	$\frac{\Sigma \text{Elemen masyarakat yang dibina}}{\Sigma \text{elemen masyarakat terget pembinaan}} \times 100$	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Bidang Wasbang, ekososbud

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang Ekososbud yang dikeluarkan sesuai standar	Kebijakan ketahanan ekososbud agama yang dibuat dan pelaksanaan fasilitasi P4GN serta pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	$\frac{\sum \text{Kebijakan ketahanan ekososbud agama}}{\sum \text{Target kebijakan ketahanan ekososbud agama}} \times 100$		
4.	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada Kader partai politik	Persentase yang menunjukkan proporsi kader partai politik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai, dibandingkan dengan total jumlah kader partai dalam periode tertentu	$\frac{\sum \text{Kader yang Mengikuti Pendidikan Politik}}{\sum \text{Total Kader Partai Politik}} \times 100$	Kabid Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas
5.	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persentase ormas yang aktif yang melaporkan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar	$\frac{\sum \text{Ormas yang Mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya}}{\sum \text{Ormas terdata di kabupaten Banjar}} \times 100$		
6.	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persentase jumlah pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik yang diselesaikan	$\frac{\sum \text{Potensi konflik sosial yang diselesaikan}}{\sum \text{Konflik yang terjadi}} \times 100$	Kabid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Bidang Wasnas
7.	Terkoordinirnya penyusunan dokumen perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persentase terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	$\frac{\sum \text{kegiatan yang terlaksana}}{\sum \text{kegiatan}} \times 100$	Kasubbag Perencanaan	Subbag. Perencanaan
8.	Tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penatausahaan keuangan dan aset perangkat daerah yang tertib dan tepat waktu	$\frac{\sum \text{kegiatan yang terlaksana}}{\sum \text{kegiatan}} \times 100$	Kasubbag Keuangan dan Aset	Subbag Keuangan dan Aset

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
9.	Lancarnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang berkualitas	Persentase jumlah dokumen/layanan administrasi kepegawaian yang diproses tepat waktu, sesuai prosedur, dan lengkap dibandingkan dengan total dokumen/layanan administrasi kepegawaian.	$\frac{\sum \text{Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas}}{\sum \text{Total dokumen administrasi kepegawaian}} \times 100$	Kasubbag Umpeg	Subbag. Umpeg
10.	Lancarnya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang berkualitas	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang tertib dan tepat waktu	$\frac{\sum \text{lap dan berkas yg disusun tertib \& tepat waktu}}{\sum \text{Lap dan berkas yg disusun}} \times 100$		
11.	Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang berkualitas	Persentase pengadaan unit Barang Milik Daerah yang terlaksana	$\frac{\sum \text{Unit pengadaan Barang Milik Daerah}}{\sum \text{Unit pengadaan BMD yg direncanakan}} \times 100$		
12.	Lancarnya jasa penunjang pelayanan umum Perangkat Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum yang berkualitas	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	$\frac{\sum \text{BMD yang mendapatkan pemeliharaan}}{\sum \text{BMD yg masuk target pemeliharaan}} \times 100$		
13.	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang berkualitas	$\frac{\sum \text{Jumlah Sarpras Sesuai Kebutuhan dan Berkualitas}}{\sum \text{Total sarpras yang dibutuhkan}} \times 100$		
14.	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti dan paham pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan berbanding jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	$\frac{\sum \text{masyarakat yang ikut dan paham}}{\sum \text{masyarakat yang mengikuti pembinaan}} \times 100$	Kasubbid Ideologi dan Wasbang	Bidang Ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
15.	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah masyarakat yang mengikuti dan paham pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya berbanding jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	$\frac{\sum \text{masyarakat yang ikut dan paham}}{\sum \text{masyarakat yang mengikuti pembinaan}} \times 100$	Kasubbid Ekososbud	Bidang Ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama
16.	Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama	Persentase rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti berbanding dengan jumlah yang diberikan FKUB	$\frac{\sum \text{Total rekomendasi yg ditindak lanjuti}}{\sum \text{Rekomendasi FKUB}} \times 100$		
17.	Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat	Persentase kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang terlaksana	Perbandingan antara jumlah kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang telah dilaksanakan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu	$\frac{\sum \text{Kegiatan pendidikan politik yang terlaksana}}{\sum \text{Kegiatan pendidikan politik yang direncanakan}} \times 100$	Kasubbid Politik dalam Negeri	Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas
18.	Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	Persentase ormas yang terlegalisasi di kemendagri dan terdaftar di Kemenkumham RI	$\frac{\sum \text{Ormas yang terlegalisasi di Kemendagri dan di Kemenkumham}}{\sum \text{Ormas terdata di kabupaten banjar}} \times 100$	Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas
19.	Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Presentase masyarakat yang memahami kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen yang terlaksana	$\frac{\sum \text{masyarakat yang memahami}}{\sum \text{masyarakat yang mengikuti}} \times 100$	Kasubbid Kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Bidang Wasnas

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
20.	Meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	Persentase jumlah penanganan konflik yang ditindak lanjuti	$\frac{\sum \text{penanganan potensi konflik sosial ditindaklanjuti}}{\sum \text{penanganan potensi konflik sosial yang dilakukan}} \times 100$	Kasubbid Penanganan Konflik	Bidang Wasnas



KEPALA BADAN,

dr. H. Tofik Norman Hidayat

Pembina Utama Muda

NIP. 19730319 200501 1 010

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 35 Tahun 2025

TANGGAL : 22 September 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
FUNGSIONAL DAN PELAKSANA ASN BAKESBANGPOL KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah adalah total dokumen perencanaan dan pelaporan resmi yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran, mencakup dokumen seperti Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, serta dokumen lain yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai kewajiban perangkat daerah.	Σ Dokumen Perencanaan SKPD	Staff Perencanaan	Perencanaan
2.	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang disusun oleh masing-masing SKPD dalam satu tahun anggaran, sesuai ketentuan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD.	Σ RKA-SKPD		
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) yang disusun oleh SKPD dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD Perubahan.	Σ Perubahan RKA-SKPD		

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing SKPD dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD.	\sum DPA-SKPD		
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan DPA-SKPD) yang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing SKPD dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD Perubahan.	\sum Perubahan DPA-SKPD		
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun oleh masing-masing SKPD dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PermenPAN-RB, Permendagri).	\sum Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Total laporan hasil evaluasi kinerja yang disusun oleh pemerintah daerah terhadap capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri tentang evaluasi kinerja perangkat daerah, PermenPAN-RB tentang SAKIP).	\sum Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		
8.	Tersedianya dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorale Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorale Daerah	Jumlah dokumen hasil kegiatan Walidata yang berfungsi sebagai pendukung penyelenggaraan statistik sektoral daerah, mencakup kompilasi metadata, validasi data, penyusunan publikasi data sektoral, serta dokumentasi kegiatan koordinasi dengan produsen data di perangkat daerah.	\sum Dokumen hasil penyelenggaraan Walidata pendukung statistik sektoral		

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
9.	Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang berhasil dihimpun dari perangkat daerah dan telah melalui proses pemeriksaan/validasi sesuai prinsip Satu Data Indonesia (SDI), meliputi aspek kesesuaian metadata, konsistensi data, dan kelengkapan dokumen pendukung.	Σ Data statistik sektoral		
10.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang meliputi PNS dan PPPK, yang menerima gaji pokok beserta tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran.	Σ ASN aktif terdaftar dalam daftar gaji dan tunjangan		
11.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari proses penatausahaan serta pengujian/verifikasi keuangan di lingkungan SKPD, meliputi dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPP, SPM, bukti transaksi), serta dokumen hasil verifikasi/pengujian keabsahan transaksi dan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Σ Dokumen penatausahaan keuangan SKPD dan verifikasi/ pengujian keuangan		
12.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Total laporan keuangan akhir tahun yang disusun oleh SKPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).	Σ Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Staff Keuangan	Keuangan
13.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran) sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Laporan ini memuat realisasi anggaran, kas, serta informasi keuangan lainnya yang wajib dilaporkan kepada BPKAD.	Σ Laporan keuangan periodik SKPD		

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
14.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta (ASN/pegawai daerah/unsur terkait) yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) terkait implementasi peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga lain yang relevan.	\sum Peserta bimtek yang hadir	Staff Umpeg	Umum kepegawaian
15.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik dan penerangan (lampu, kabel, saklar, panel listrik, stop kontak, MCB, dan perlengkapan lainnya) yang disediakan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pemeliharaan bangunan kantor pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.	\sum Paket komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia		
16.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran perangkat daerah dalam satu tahun anggaran, mencakup kebutuhan administrasi, kerja sehari-hari, serta penunjang pelayanan publik.	\sum Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		
17.	Tersedianya Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Total paket bahan logistik kantor yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional perkantoran perangkat daerah dalam satu tahun anggaran, mencakup kebutuhan habis pakai seperti alat tulis kantor (ATK), kertas, tinta printer, serta bahan penunjang kerja lainnya.	\sum Paket bahan logistik kantor yang disediakan		
18.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan untuk mendukung operasional administrasi pemerintahan dalam satu tahun anggaran, meliputi pencetakan formulir, buku, laporan, banner/spanduk, kartu identitas pegawai, serta penggandaan dokumen perkantoran.	\sum Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
19.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan kegiatan yang dihasilkan dari pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu ke lingkungan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Laporan ini mencakup data tamu, tujuan kunjungan, bentuk fasilitasi, serta hasil atau tindak lanjut dari kunjungan.	\sum Laporan fasilitasi kunjungan tamu yang disusun/ disahkan		
20.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan kegiatan yang dihasilkan dari pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi oleh SKPD dalam satu tahun anggaran, yang mencakup agenda, peserta, hasil pembahasan, serta tindak lanjut dari rapat atau konsultasi.	\sum Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		
21.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung fungsi dan operasional gedung kantor maupun bangunan lain milik pemerintah daerah, meliputi perabot, peralatan kerja, fasilitas keamanan, fasilitas kebersihan, sistem kelistrikan, jaringan air, serta fasilitas penunjang lainnya.	\sum Sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang disediakan		
22.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan kegiatan yang dihasilkan dari penyediaan jasa pelayanan umum kantor dalam satu tahun anggaran. Jasa pelayanan umum ini meliputi jasa kebersihan, keamanan, pemeliharaan sarana prasarana, utilitas (listrik, air, internet), transportasi dinas, serta jasa penunjang lainnya untuk kelancaran operasional kantor.	\sum Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disusun/ disahkan		
23.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan dinas (roda dua maupun roda empat) yang digunakan sebagai kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan, yang mendapatkan pemeliharaan rutin (service, perbaikan, suku cadang, BBM) dan dibayarkan pajak kendaraannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran.	\sum kendaraan perorangan dinas/ jabatan yang dipelihara		

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
24.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda dua, roda empat, maupun kendaraan khusus) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dinas di lapangan, yang mendapatkan pemeliharaan rutin (service, perbaikan, suku cadang, BBM) serta dibayarkan pajak dan perizinannya (PKB, STNK, dan uji kendaraan bila diwajibkan) dalam satu tahun anggaran.	Σ Kendaraan operasional/ lapangan yang dipelihara		
25.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya milik pemerintah daerah yang mendapatkan kegiatan pemeliharaan rutin maupun rehabilitasi dalam satu tahun anggaran. Pemeliharaan mencakup kegiatan perawatan agar aset tetap berfungsi baik, sedangkan rehabilitasi mencakup perbaikan sebagian atau seluruh bagian bangunan tanpa mengubah bentuk asli secara signifikan.	Σ Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi		
26.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain milik pemerintah daerah yang mendapatkan kegiatan pemeliharaan rutin maupun rehabilitasi dalam satu tahun anggaran. Sarana dan prasarana dimaksud antara lain meliputi: perabot kantor, sistem kelistrikan, sistem air bersih, AC, lift, genset, peralatan kebersihan, jaringan komunikasi, hingga fasilitas keamanan	Σ Sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi		
27.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah dokumen kebijakan teknis yang disusun oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Kebijakan teknis ini dapat berupa pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, rencana aksi, naskah akademik, atau dokumen perencanaan lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Σ Kebijakan Teknis Bidang Ideologi, Wasbang	Staff Bidang Ideologi, Wasbang	Bidang Ideologi, Wasbang

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
28.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Total peserta yang mengikuti kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis atau program yang diselenggarakan perangkat daerah dalam rangka implementasi ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, pembentukan karakter bangsa, pembauran kebangsaan, penguatan nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan pelestarian sejarah kebangsaan dalam satu tahun anggaran.	Σ Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wabang		
29.	Terlaksananya koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan koordinasi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah atau antar-perangkat daerah dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan penyelarasan kebijakan maupun program di bidang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, pembentukan karakter bangsa, pembauran kebangsaan, penguatan nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta pelestarian sejarah kebangsaan selama satu tahun anggaran.	Σ Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi, Wasbang		
30.	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program/kegiatan di bidang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, pembentukan karakter bangsa, pembauran kebangsaan, penguatan nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta sejarah kebangsaan dalam satu tahun anggaran.	Σ Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi, Wasbang		

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
31.	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Jumlah laporan yang dihasilkan dari kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pengembangan aktivitas kepaskibrakaan serta pembinaan alumni Paskibraka (Purnapaskibraka) dalam satu tahun anggaran. Laporan ini mencakup kegiatan rekrutmen, pelatihan, pengibaran bendera, pembinaan karakter, serta kegiatan pasca-tugas Paskibraka.	Σ Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		
32.	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Jumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang direkrut, dilatih, dan ditetapkan melalui seleksi resmi oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.	Σ Paskibraka		
33.	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan yang dihasilkan dari kegiatan pembinaan lanjutan kepada alumni Paskibraka (Purnapaskibraka) yang telah ditetapkan sebagai Duta Pancasila. Pembinaan ini meliputi penguatan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, kepemimpinan, pembauran kebangsaan, serta peran aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.	Σ Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		
34.	Terlaksananya penugasan paskibraka	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan yang memuat hasil kegiatan dan peran yang dijalankan oleh Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila dalam satu tahun anggaran. Laporan ini mencakup aktivitas penyebarluasan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, bela negara, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendukung pembentukan karakter bangsa.	Σ Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
35.	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah anggota Purnapaskibraka yang telah ditetapkan dan dikukuhkan sebagai Duta Pancasila oleh lembaga berwenang dalam satu tahun anggaran. Purnapaskibraka Duta Pancasila adalah alumni Paskibraka yang diberi mandat untuk menjadi teladan dan agen penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan karakter bangsa di masyarakat.	Σ Purnapaskibraka Duta Pancasila		
36.	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah dokumen kebijakan yang disusun oleh perangkat daerah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta mendukung fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah dalam satu tahun anggaran. Kebijakan ini dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, pedoman, petunjuk teknis, atau dokumen perencanaan strategis lainnya.	Σ Kebijakan di Bidang Ekososbud		
37.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan implementasi kebijakan yang diselenggarakan perangkat daerah terkait ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan dalam satu tahun anggaran.	Σ Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ekososbud	Staff Bidang Ekososbud	Bidang Ekososbud

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
38.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan koordinasi antar-perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan stakeholder lainnya dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah dalam satu tahun anggaran.	Σ Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ekososbud		
39.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan yang dihasilkan dari kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan atau program di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dalam satu tahun anggaran.	Σ Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ekososbud		
40.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan implementasi kebijakan yang dilaksanakan perangkat daerah terkait bidang politik, demokrasi, dan pemerintahan umum dalam satu tahun anggaran.	Σ Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Politik	Staff Bidang Politik	Bidang Politik

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
41.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti forum koordinasi yang diselenggarakan perangkat daerah terkait bidang politik, demokrasi, kelembagaan pemerintahan, pemilu/pilkada, serta pemantauan situasi politik dalam satu tahun anggaran.	Σ Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Politik		
42.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen laporan yang disusun sebagai hasil kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan/program di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, demokrasi, kelembagaan pemerintahan, partai politik, pemilu/pilkada, serta pemantauan situasi politik daerah dalam satu tahun anggaran.	Σ Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Politik		
43.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan implementasi kebijakan yang diselenggarakan perangkat daerah terkait pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa, pengawasan ormas lokal dan ormas asing dalam satu tahun anggaran.	Σ Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ormas	Staff Bidang Ormas	Bidang Ormas

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
44.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan yang disusun sebagai hasil kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan/program di bidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, serta pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dalam satu tahun anggaran.	Σ Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ormas		
45.	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah dokumen program kerja yang disusun oleh perangkat daerah terkait kewaspadaan dini, intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini mencakup rencana operasional, pedoman, SOP, strategi, dan dokumen perencanaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.	Σ Dokumen Program kerja di Bidang Wasdin dan Penangan Konflik	Staff Bidang Wasdin dan Penangan Konflik	Bidang Wasdin dan Penangan Konflik
46.	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah kebijakan yang disusun oleh perangkat daerah terkait kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dalam satu tahun anggaran. Kebijakan ini berupa pedoman, strategi, keputusan teknis, atau regulasi internal yang mendukung penyelenggaraan tugas kewaspadaan dan penanganan konflik.	Σ Kebijakan di Bidang Wasdin dan Penangan Konflik		

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
47.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan implementasi kebijakan perangkat daerah di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dalam satu tahun anggaran.	Σ Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Wasdin dan Penangan Konflik		
48.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta yang hadir dan mengikuti kegiatan koordinasi antar-perangkat daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta stakeholder terkait lainnya untuk menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang kewaspadaan dini, intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah selama satu tahun anggaran.	Σ Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Wasdin dan Penangan Konflik		
49.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan yang disusun sebagai hasil kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan/program di bidang kewaspadaan dini, intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dalam satu tahun anggaran.	Σ Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Wasdin dan Penanganan Konflik		

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
50.	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen resmi yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tingkat kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini mencakup notulen rapat, berita acara, keputusan, rekomendasi, dan dokumen tindak lanjut lain yang sah secara administrasi.	Σ Dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota		



KEPALA BADAN,

dr. H. Tofik Norman Hidayat
Pembina Utama Muda
NIP. 19730319 200501 1 010